

Belajar Hidup Berdampingan: Model-Model Pengelolaan Keragaman Agama oleh Sekolah di Indonesia

Learning to Coexist: Models of Religious Diversity Management by Schools in Indonesia

Herman Hendrik

Pusat Penelitian Kebijakan
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
herman.hendrik@kemdikbud.go.id

Artikel disubmit : 20 Februari 2021
Artikel direvisi : 16 April 2021
Artikel disetujui : 15 Mei 2021

ABSTRACT

The diversity in Indonesia often becomes a medium for horizontal conflicts, including conflicts that carry the name of religion. The world of education is also inseparable from problems related to religious diversity, so a diversity management strategy is needed in the context of education. This paper analyzes various religious diversity management practices in several schools in Indonesia. The research used qualitative approach with the primary data collection techniques, namely FGD, interviews, and observations. The research was conducted in Purwakarta, Depok, Semarang, Yogyakarta and Medan. The research findings were analyzed qualitatively through classification based on emerging issues. This study finds that various religious diversity management practices in schools include the following aspects: curriculum, extracurricular, co-curricular, facilities and infrastructure, class management, recruitment of GTK, celebration events, and social action. The factors that contribute to the birth of these practices are intervention by regional leader, non-governmental organizations, religious leaders, the vision of the institution, and teacher initiatives. Based on various practices and factors of birth, this paper proposes four models of managing religious diversity in schools, namely normative, independent, advanced, and innovative models.

Keywords: Diversity Management; Religion; Education; School, Model

ABSTRAK

Keragaman yang ada di Indonesia tak jarang menjadi wahana konflik horizontal, termasuk konflik yang membawa nama agama. Dunia pendidikan pun tak lepas dari permasalahan yang berkaitan dengan keragaman agama sehingga diperlukan strategi pengelolaan keragaman dalam konteks pendidikan. Tulisan ini menganalisis berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di beberapa sekolah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang utama yaitu FGD, wawancara, dan observasi. Penelitian dilakukan di Purwakarta, Depok, Semarang, Yogyakarta, dan Medan. Temuan penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara klasifikasi berdasarkan isu-isu yang muncul. Penelitian ini menemukan bahwa ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah mencakup aspek-aspek: kurikulum, ekstrakurikuler, kokurikuler, sarana dan prasarana, pengelolaan kelas, rekrutmen guru dan tenaga kependidikan, acara selebrasi, dan aksi sosial. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap lahirnya praktik-praktik tersebut yaitu intervensi dari kepala daerah, intervensi dari organisasi nonpemerintah, intervensi tokoh agama, visi lembaga, dan inisiatif guru. Berdasarkan ragam praktik dan faktor-faktor kelahirannya, tulisan ini mengemukakan empat model pengelolaan keragaman agama di sekolah; yaitu model normatif, mandiri, maju, dan inovatif.

Kata Kunci : Pengelolaan Keragaman; Agama; Pendidikan; Sekolah; Model

PENDAHULUAN

Pengelolaan keragaman merupakan isu krusial bagi negara demokratis dan majemuk seperti Indonesia. Komitmen terhadap demokrasi menuntut Indonesia untuk memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, terlepas dari latar belakang etnis, budaya, dan agama mereka. Keragaman itu perlu dikelola mengingat ia cukup rentan menjadi pintu masuk terjadinya konflik sosial yang berlatar sikap tidak bisa menerima perbedaan serta merasa benar sendiri. Pengelolaan keragaman yang baik diharapkan dapat menghadirkan masyarakat yang mengenal dan menghormati berbagai perbedaan.

Salah satu aspek keragaman yang ada di Indonesia yaitu keragaman agama. Hal tersebut karena Indonesia mengakui adanya agama-agama yang terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu serta berbagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Anwar 2018). Implikasinya yaitu negara memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama juga kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk beribadah serta mengekspresikan keyakinan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman setiap warga negara kemudian mengejewantah hingga ke ranah pendidikan formal, khususnya sekolah.

Keragaman agama juga patut menjadi perhatian mengingat potensinya untuk menjadi pintu masuk terjadinya konflik horizontal, yaitu antar pemeluk agama yang berbeda atau antar penganut aliran agama dari suatu agama. Banyak kajian mengangkat isu potensi konflik berbasis perbedaan agama sebagai latar belakang demi menunjukkan pentingnya pengelolaan keragaman agama melalui toleransi dan pemahaman multikulturalisme (lihat misalnya Hanafi et al. 2019; Sumai, Naumi, and Toni 2017; Warsah 2017). Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah memantau potensi kerentanan sosial dari keragaman masyarakat Indonesia dengan membuat indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). Indeks ini disusun dari tiga dimensi: kerja sama, toleransi, dan kesetaraan. Hasilnya, selama lima tahun terakhir, angka kerukunan beragama di Indonesia terbilang tinggi, meskipun mengalami pasang surut. Sebagai contoh, pada tahun 2019 skor rata-rata indeks KUB nasional adalah sebesar 73,83. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya; yang mana skor rata-rata indeks KUB nasional tahun 2018 yaitu 70,90 (Republika Online 2019).

Dari tiga aspek yang mendukung kerukunan beragama, aspek toleransi merupakan yang terendah dibandingkan dua aspek yang lain. Kemenag mencontohkan beberapa kasus intoleransi seperti penolakan

pendirian masjid di Kota Kupang dan penolakan izin tinggal bagi *non-Muslim* di salah satu desa di Kabupaten Bantul. Untuk mengatasi tantangan intoleransi ini, sejumlah pihak berinisiatif mempromosikan sikap-sikap toleran dalam hubungan antar pemeluk agama. Kemenag sendiri mengampanyekan pentingnya “moderasi beragama” dengan menekankan pada penguatan modal sosial berupa semangat gotong royong di antara warga bangsa (Kementerian Agama 2019).

Dalam buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan oleh Kemenag, dicontohkan beberapa kasus yang menggambarkan sikap toleransi beragama, yang merupakan salah satu elemen dalam moderasi beragama. Contoh pertama yaitu upacara kebaktian tutup peti mati yang dilaksanakan di halaman Masjid Darussalam, sebuah masjid di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan dengan ijin dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang bersangkutan mengingat tempat tinggal keluarga jenazah terletak di dalam gang yang sempit yang menyulitkan keluar-masuknya peti mati. Contoh lainnya yaitu kebiasaan umat Hindu dan Umat Islam di daerah Blahbatu, Gianyar, Bali, dalam bekerja sama dalam perayaan hari besar keagamaan masing-masing. Ada juga kasus Kampung Sawah, sebuah daerah di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang masyarakatnya terdiri dari beberapa agama yang berbeda, yang terbiasa saling mengunjungi dalam acara perayaan hari besar keagamaan dan memiliki tiga rumah ibadah—masjid, gereja Kristen, dan gereja Katolik di jalan yang sama (Kementerian Agama 2019).

Selain Kemenag, sejumlah organisasi non pemerintah juga terlibat dalam promosi penghormatan terhadap keragaman agama. Salah satunya adalah Wahid Foundation yang pada tahun 2018 merilis “Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia (KBB) Tahun 2017.” Selain memuat berbagai kasus pelanggaran KBB, laporan tersebut juga mengetengahkan berbagai praktik baik toleransi di 32 provinsi di Indonesia (Wahid Foundation 2018).

Narasi tentang toleransi beragama juga dimunculkan melalui Indeks Kota Toleran (IKT) yang disusun dan dipublikasikan oleh Setara Institute. Dokumen IKT mencatat beberapa kota memiliki indeks toleransi yang rendah (Jakarta, Banda Aceh, dan Tanjung Balai) dan tinggi (Singkawang, Salatiga, dan Pematang Siantar) (Setara Institute 2018). Berbagai praktik baik pengelolaan keragaman agama juga muncul dalam sejumlah laporan media massa. Republika, misalnya, melaporkan sebuah desa di Jawa Tengah yang memiliki masjid, gereja, serta pura yang berdiri berdampingan, yang didukung oleh sikap toleran di antara warganya (Republika 2019). Sementara itu, sebuah desa di Jawa Timur terekspose karena masyarakatnya, yang beragam

secara agama, terbiasa saling bergotong royong membersihkan tempat ibadah serta merayakan hari besar agama lain (Tribunnews.com 2018).

Terkait dengan wacana keragaman agama dalam dunia pendidikan, sejumlah lembaga riset melaporkan adanya praktik dan sikap tidak mau menerima serta menghormati keragaman agama dalam dunia pendidikan. Pada akhir tahun 2018 lalu, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah merilis hasil survei bahwa masih banyak guru beragama Islam di sekolah-sekolah di Indonesia memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi. Sebagai contoh, 21% responden tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan di tempat tinggal mereka; dan 56% responden tidak setuju bahwa non-Muslim boleh mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar mereka (PPIM UIN Jakarta 2018). Terlepas dari adanya perdebatan, penelitian PPIM itu setidaknya dapat menjadi penggugah kesadaran tentang adanya potensi intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan formal. Adapula hasil penelitian Maarif Institute yang melaporkan tentang penetrasi paham intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar yang tergabung dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Dalam dokumen tersebut, dilaporkan bahwa ideologi intoleran dan radikal telah merasuk ke dalam personel OSIS dengan melibatkan jaringan alumni, lembaga keagamaan, dan partai politik (Maarif Institute 2018).

Meskipun demikian, tidak sedikit pula lembaga pendidikan yang telah berupaya untuk mempromosikan penghormatan terhadap keragaman agama. Yayasan Cahaya Guru, misalnya, menerbitkan sebuah buku yang memuat narasi tentang sejumlah sekolah dengan praktik baik pengelolaan keragaman agama di Indonesia. Salah satu contohnya adalah sekolah yang berada di bawah Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda di Medan yang menyelenggarakan pendidikan multikultural. Sekolah tersebut memiliki empat rumah ibadah dari agama yang berbeda-beda, yaitu masjid, gereja, vihara, dan pura (Yayasan Cahaya Guru 2019).

Hasil kajian Maarif Institute juga mengidentifikasi beberapa sekolah yang memiliki kegiatan yang dianggap mendukung penghormatan terhadap keragaman agama, salah satunya yaitu SMAN 1 Kabupaten Cirebon, yang memiliki kegiatan “Karnaval Kebinekaan”, di mana para siswa diakrabkan dengan kebinekaan dengan cara memakai pakaian adat yang ada di nusantara (Maarif Institute 2018).

Uraian di atas telah mengulas tentang wacana keragaman agama di Indonesia, termasuk di dunia pendidikan. Di satu sisi, keragaman agama dapat menjadi sumber konflik horizontal; serta ada potensi mere-

baknya sikap yang tidak mau menerima dan menghormati keragaman agama, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan peserta didik. Di sisi lain, telah pula ditunjukkan bahwa sudah ada unit-unit sosial kemasyarakatan serta satuan-satuan pendidikan (baca: sekolah) yang telah dapat mengelola keragaman agama secara baik. Hal itu mendorong pada pemikiran bahwa dunia pendidikan merupakan salah satu pintu masuk terbaik untuk mempromosikan penghormatan terhadap keragaman agama, karena pandangan dan sikap tertentu dapat disosialisasikan secara efektif melalui lembaga pendidikan. Lebih jauh lagi, dalam situasi keragaman yang rentan, pendidikan memiliki dua potensi sekaligus: mengantisipasi ataupun justru memperparah kerentanan.

Berangkat dari hal-hal tersebut, dirasa perlu untuk mengidentifikasi lebih lanjut upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai sekolah untuk mengelola keragaman agama. Sehubungan dengan itu, tulisan ini memaparkan berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang dilakukan oleh beberapa sekolah. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji proses-proses yang memungkinkan munculnya praktik-praktik pengelolaan keragaman agama tersebut.

KERANGKA TEORI

Dalam melihat keragaman, penelitian ini menggunakan perspektif multikulturalisme. Hal tersebut mengingat penekanan multikulturalisme yaitu pada relasi antar-kebudayaan, di mana keberadaan suatu kebudayaan harus menyadari adanya kebudayaan-kebudayaan lain. Penekanan itu berbeda dari pluralisme yang penekanannya yaitu pada keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya. Dalam pandangan seperti itu, setiap kebudayaan dilihat sebagai kesatuan yang masing-masing berbeda. Berdasarkan konsep multikulturalisme kemudian hadir konsep-konsep yang berkaitan dengan kesetaraan, toleransi, dan saling menghargai (Syarifuddin 2006).

Lebih jauh lagi, Suparlan (2002) mengemukakan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang menekankan adanya kesederajatan dalam keanekaragaman kebudayaan. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme menjadi pedoman bagi kehidupan manusia dan operasional melalui pranata-pranata sosial.

Dalam konteks pendidikan, dikenal adanya pendidikan multikultural. Konsep tersebut asalnya berkembang di Amerika dan Eropa, yang sebetulnya merupakan pengembangan dari studi interkultural dan multikulturalisme. Sebagai sebuah strategi pendidikan, tujuan awalnya yaitu membentuk peserta didik yang berasal dari populasi mayoritas menjadi pribadi-pribadi yang toleran terhadap para pendatang atau im-

igran, sesuai dengan konteks Amerika dan Eropa yang banyak menjadi tujuan para imigran dari berbagai belahan dunia. Dalam perkembangannya, semangat yang menjiwai pendidikan multikultural yaitu demokrasi, humanisme, dan pluralisme, yang mengusung gagasan tentang kebebasan dari tekanan yang membatasi kemanusiaan (Yaqin 2019).

Secara definisi, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai “pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan” (Arifudin 2007). Pendidikan multikultural penting dalam membentuk peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai bersama, mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dalam keragaman yang ada di lingkungannya. Dalam implementasinya, pendidikan multikultural tidak harus berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran, tetapi dapat diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran dan proses pendidikan yang ada di sekolah, termasuk melalui pemberian keteladanan dari para awak sekolah (Arifudin 2007).

Arifin (2012) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah pengejawantahan kesadaran mengenai keragaman kebudayaan, hak-hak asasi manusia, serta penghapusan prasangka untuk suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural sangat diperlukan di Indonesia dalam konteks menguatnya sentimen-sentimen keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara lebih spesifik, pendidikan multikultural bermanfaat dalam menanggulangi ideologi dan gerakan fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme (Baharun dan Awwaliyah 2017).

KAJIAN PUSTAKA

Kajian mengenai keragaman agama di dunia pendidikan telah banyak dilakukan. Sebagai contoh yaitu tulisan Apriliani dan Ghazali (2016), yang mengemukakan bahwa pengurus ROHIS suatu SMA di Bekasi memiliki sikap toleransi terhadap agama lain yang tergolong pasif. Kriteria yang mereka gunakan ialah adanya penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan agama serta pemberian kesempatan bagi siswa beragama lain untuk beribadah; yang dilandasi dengan alasan penghindaran terhadap konflik karena perbedaan agama serta adanya pandangan bahwa sekolah negeri berarti harus inklusif terhadap semua agama.

Maarif Institute (2018) sebetulnya telah mengidentifikasi praktik-praktik baik pengelolaan keragaman agama di sekolah. Praktik-praktik baik yang dicontohkan itu ada di beberapa sekolah di Cirebon. Adapun kegiatannya berupa pengenalan dan pengalaman fakta kebinekaan, penyelenggaraan karnaval ke-

binekaan, dan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta dengan ormas yang dianggap mengusung Islam moderat.

Kajian oleh Karolina, Sulistyarini, dan Rustiyarso (2019) mengenai peran sekolah dalam membangun sikap toleransi beragama. Dalam tulisannya, para penulis mengemukakan bahwa, dalam kasus yang mereka pelajari di SMAN 3 Pontianak, hal-hal yang dilakukan sekolah untuk menumbuhkan toleransi beragama yaitu berupa himbauan dan tindakan nyata. Himbauan berisi tentang tuntunan untuk selalu menghormati perbedaan agama dan menjaga persatuan. Sementara tindakan nyata berupa pemberian teladan dalam berlaku adil terhadap setiap orang yang berbeda agama serta penyediaan sarana dan prasarana untuk perayaan hari besar setiap agama.

Contoh kajian lainnya yaitu penelitian Handayani (2016), yang mengidentifikasi upaya SMAN 1 Muntilan dalam rangka menangkal diskriminasi terhadap minoritas, terutama dalam hal agama. Upaya-upaya tersebut yaitu: akomodasi pendidikan agama minoritas seperti Budha serta penyamaan persepsi tentang keberagaman bahwa sekolah dimaksud merupakan sekolah negeri diperuntukkan bagi setiap orang, yang dilakukan dalam acara briefing atau apel pagi. Upaya lainnya adalah penyediaan rumah ibadah bagi siswa beragama selain Islam dan penyediaan rubrik bagi organisasi kerohanian Katolik dan Kristen di majalah sekolah. Sekolah tersebut juga berusaha untuk memfasilitasi kegiatan spiritual siswa Katolik dan Kristen dan perayaan Idul Kurban/Adha secara bersama-sama lintas agama.

Sementara itu, hasil studi Raihani (2014) memaparkan tentang praktik toleransi beragama di sebuah sekolah negeri di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam artikelnya, terungkap bahwa para siswa dan guru di sekolah dimaksud telah memiliki paham toleransi serta mempraktikkannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh modal kebudayaan (cultural capital) para siswa yang memang sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan etnisitas. Namun, praktik-praktik toleransi beragama itu masih bersifat sporadis, dalam pengertian tidak terencana dan tidak terlembagakan (Raihani 2014).

Hasil-hasil penelitian tersebut telah menggambarkan berbagai upaya satuan pendidikan dalam mengelola keragaman agama. Namun, penelitian-penelitian itu tidak mengungkapkan proses-proses yang berkontribusi terhadap terwujudnya praktik-praktik tersebut. Sehubungan dengan itu, berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, tulisan ini berusaha untuk menggali praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah serta proses-proses yang memungkinkan praktik-praktik tersebut hadir.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mendasari tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi-lokasi pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah), Depok (Jawa Barat), Purwakarta (Jawa Barat), dan Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta). Adapun sekolah-sekolah yang disasar yaitu sekolah-sekolah dari berbagai jenjang, dari jenjang SD hingga SMA, dengan status negeri serta swasta, untuk melihat kasus-kasus pengelolaan keragaman agama dalam konteks yang bervariasi. Lima daerah tersebut dipilih karena teridentifikasi memiliki sekolah-sekolah yang mempraktikkan pengelolaan keragaman agama.

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan diskusi kelompok terpusat (*focused group discussion* [FGD]), wawancara, dan observasi. FGD dan wawancara dilakukan dengan para kepala sekolah dan guru selaku perwakilan sekolah yang dianggap memiliki praktik pengelolaan keragaman agama yang baik. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak lain yang terkait dengan sekolah, misalnya perwakilan yayasan pendidikan untuk kasus sekolah-sekolah swasta. Sementara itu, observasi dilakukan terhadap berbagai aspek fisik yang terkait dengan pengelolaan keragaman agama; seperti taman, ruangan belajar, sarana dan prasarana ibadah, fasilitas ekstrakurikuler, spanduk, buku, komik, dan poster.

Data yang diperoleh dari proses penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara klasifikasi temuan berdasarkan isu tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian. Secara spesifik, analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasi berbagai praktik pengelolaan keragaman dan kemudian memberinya label-label yang dianggap sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah

Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa praktik pengelolaan keragaman agama yang dilakukan oleh sekolah-sekolah sangat bervariasi. Secara umum, ada sekolah-sekolah terutama sekolah negeri yang cenderung normatif dalam pengelolaan keragaman. Sekolah-sekolah tersebut mengandalkan materi yang ada dalam mata pelajaran PPKn serta program penguatan pendidikan karakter. Namun, ada sekolah-sekolah tertentu yang memiliki praktik yang patut mendapatkan perhatian, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1 memaparkan delapan aspek yang menjadi sasaran dalam pengelolaan keragaman agama di sekolah. Pertama, praktik pengelolaan keragaman agama itu ada yang berkaitan dengan kurikulum. Sebagai contoh yaitu modifikasi materi mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan penyediaan kelas *interreligious education* yang ada di dua sekolah swasta di Yogyakarta. Kedua, di antara praktik-praktik itu ada yang berkaitan dengan ekstrakurikuler (ekskul). Contoh praktik seperti itu adalah ekskul rebana yang diikuti siswa lintas agama di salah satu SMK Katolik di Semarang atau fasilitasi kegiatan rohani bagi setiap ekskul keagamaan. Ketiga, di antara praktik-praktik itu ada yang berkaitan dengan program kokurikuler. Contoh dari hal itu misalnya program *homestay* dan kunjungan ke museum, seperti yang dilakukan oleh sekolah Islam di Depok dan Purwakarta.

Keempat, di antara praktik-praktik itu ada yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kasus praktik seperti itu misalnya penyediaan musala di beberapa sekolah Katolik dan Kristen, penyediaan ruang belajar pendidikan agama non-PAI, dan pembuatan taman sebagai ruang simbol keragaman. Kelima, di antara praktik-praktik itu ada yang berkaitan dengan pengelolaan kelas; misalnya pembuatan kontrak siswa dan pembauran komposisi siswa di kelas, yang ada di salah satu sekolah negeri di Purwakarta. Keenam, di antara praktik-praktik itu ada yang terkait dengan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan (GTK); yaitu bahwa sekolah-sekolah swasta dengan basis agama tertentu merekrut GTK yang agamanya berbeda-beda dengan afiliasi agama yayasannya, contohnya yaitu sekolah berbasis yayasan non-Islam di Purwakarta dan Yogyakarta yang merekrut GTK beragama Islam. Ketujuh, di antara praktik-praktik itu ada yang terkait dengan penyelenggaraan selebrasi keragaman; misalnya yaitu festival seni-budaya di sekolah-sekolah Yayasan Iskandar Muda di Medan. Kedelapan, di antara praktik-praktik itu, ada pula yang terkait dengan aksi sosial. Contoh kasusnya yaitu donasi lintas agama dan subsidi silang antar siswa yang berbeda agama yang ada di beberapa sekolah yang diceritakan di atas.

Tabel 1 Ragam Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah

Aspek	Contoh Praktik
Kurikulum	Modifikasi materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan penyediaan kelas <i>interreligious education</i>
Ekstrakurikuler	Ekskul rebana yang diikuti siswa lintas agama di salah satu SMK Katolik di Semarang atau fasilitasi kegiatan rohani bagi setiap ekskul keagamaan
Kokurikuler	Program <i>homestay</i> dan kunjungan ke museum
Sarana dan prasarana	Penyediaan musala di beberapa sekolah Katolik dan Kristen, penyediaan ruang belajar pendidikan agama non PAI, dan pembuatan taman sebagai ruang simbol keragaman

Kekurikuler	Program <i>homestay</i> dan kunjungan ke museum
Sarana dan prasarana	Penyediaan musala di beberapa sekolah Katolik dan Kristen, penyediaan ruang belajar pendidikan agama non PAI, dan pembuatan laman sebagai ruang simbol keragaman
Pengelolaan kelas	Pembuatan kontrak siswa, doa lintas agama, dan pembauran komposisi siswa di kelas
Rekrutmen GTK	Sekolah sekolah swasta dengan basis agama tertentu merekrut GTK yang agamanya berbeda-beda dengan afiliasi agama yayasan (misalnya sekolah ber yayasan Katolik merekrut GTK beragama Islam)
Acara selebrasi	Festival seni budaya
Aksi sosial	Donasi lintas agama dan subsidi silang antar siswa yang berbeda agama

Sumber: hasil olah data.

Faktor-faktor Pendorong Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah

Berbagai praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah negeri di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya merupakan implementasi pendidikan karakter, khususnya karakter religius dan nasionalis, serta implementasi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter (Perbup No. 69/2015). Perbup tersebut sebetulnya menyoar pendidikan karakter, tetapi dalam implementasinya ada penjaminan terhadap fasilitasi peningkatan iman dan takwa setiap siswa sesuai dengan agama mereka masing-masing. Perwujudannya kemudian yaitu penyediaan guru-guru AKPK dan ruangan ibadah atau ruang pembelajaran agama. Ada dua hal yang dapat dipetik dari implementasi Perbup itu. Pertama, ada harapan bahwa setiap siswa memahami ajaran agamanya masing-masing melalui bimbingan guru-guru yang jelas kualifikasinya; sehingga tidak mudah terpengaruh ajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua, penjaminan fasilitasi peningkatan iman dan takwa bagi setiap siswa dari setiap agama menunjukkan, sekaligus mengajarkan, penghormatan terhadap keragaman. Adapun praktik pengelolaan keragaman di sekolah swasta biasanya terkait dengan kebijakan yayasan pendidikan yang menaungi mereka; di samping, dalam kadar tertentu, juga dipengaruhi oleh Perbup No. 69/2015. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa proses kemunculan berbagai praktik pengelolaan keragaman di atas dapat dikaitkan dengan kemunculan Perbup No. 69/2015, untuk sekolah-sekolah negeri, dan dengan visi-misi yayasan pendidikan terkait, untuk sekolah-sekolah swasta.

Khusus untuk SMP Plus Al-Muhajirin, visi tentang toleransi jelas bersumber dari gagasan dan teladan pendiri Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Secara tegas, perwakilan Yayasan Al-Muhajirin mengungkapkan bahwa pendiri yayasan merupakan sosok yang terbuka dan terbiasa bergaul serta bekerja sama dengan orang dengan latar belakang yang beragam. Siswa dan warga sekolah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Al-Muhajirin diajarkan bahwa interaksi dan kerja sama dengan non-Muslim tidak akan membuat keimanan dan ke-Islam-an mereka luntur. Keterbukaan dan nilai toleransi itulah yang ingin dilestarikan di satuan pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Al-Muhajirin.

Lain halnya dengan berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah di Depok. Praktik-praktik yang ada di sana pada dasarnya merupakan bagian dari hal lain yang tidak secara khusus ditujukan untuk pengelolaan keragaman; misalnya penumbuhan jiwa mandiri. Namun, praktik-praktik tersebut, khususnya di sekolah-sekolah swasta Islam, diyakini dapat membekali siswa untuk berhadapan dengan keragaman atau mengenalkan siswa dengan keragaman. Sehubungan dengan itu, kemunculan praktik-praktik tersebut dapat dikaitkan dengan kelahiran berbagai program yang ada di sekolah-sekolah dimaksud. Sebagai contoh, kegiatan *homestay* muncul karena ada gagasan untuk mendidik anak-anak agar bisa hidup mandiri. Dengan demikian, pihak yang berperan dalam kelahiran praktik-praktik tersebut yaitu yayasan pendidikan tempat sekolah yang bersangkutan bernaung.

Dalam kasus Yogyakarta, praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah di daerah tersebut pada dasarnya tidak dapat ditelusuri proses kemunculannya secara jelas, tetapi sebagian masih bisa dilacak. Beberapa praktik di SMAN 1 Yogyakarta telah berlangsung sekian lama, sehingga guru-guru yang ada sekarang hanya meneruskannya begitu saja. Namun, beberapa praktik dapat dikaitkan dengan kehadiran salah satu guru Pendidikan Agama Islam. Pada awalnya, guru tersebut menemukan ada beberapa siswa yang cara pandang ke-Islam-annya cenderung ekstrem dan bahkan menolak Pancasila. Maka guru tersebut melakukan upaya-upaya atas inisiatif dirinya sendiri untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman. Guru itu melihat bahwa cara pandang beragama yang ekstrem itu salah, tidak sesuai yang ia pahami selama dia belajar Islam di pesantren dan kuliah di perguruan tinggi Islam yang mengajarkan moderasi beragama.

Praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah swasta di Yogyakarta secara umum terkait dengan pandangan yayasan tempat mereka bernaung, yang memang menekankan inklusivitas dan

multikulturalisme. Namun, dapat pula dilihat adanya peran organisasi nonpemerintah dalam penyebaran gagasan-gagasan yang mendukung pandangan itu. Berdasarkan keterangan dari salah seorang guru Pendidikan Agama Islam dari SMA PIRI 1, salah satu pihak yang berperan dalam menyadarkan para guru agama di Yogyakarta tentang peran penting mereka dalam menanamkan nilai-nilai toleransi yaitu Yayasan Interfidei, singkatan dari Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia. Organisasi tersebut memang memiliki visi tentang keragaman dan secara aktif mempromosikan keragaman dan kerja sama antaragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Interfidei telah memberikan pelatihan dan pembimbingan kepada sejumlah guru agama terkait dengan pemahaman tentang keragaman.

Sementara itu, berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah negeri di Semarang pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan setiap siswa sesuai agamanya masing-masing. Sehubungan dengan itu, proses kelahirannya tidak dapat ditelusuri dengan pasti. Pengecualian yaitu untuk praktik di SDN Pendrikan Kidul dan SDN Tandang 1. Di kedua sekolah tersebut, terlihat peran kepala sekolah dalam menginisiasi berbagai praktik yang berkaitan dengan keragaman. Lain halnya dengan sekolah-sekolah yang menjadi dampingan program Sekolah Damai, yaitu SMAN 7, SMAN 10, dan SMAN 11 Semarang. Berbagai praktik di sekolah-sekolah itu tentu saja terkait erat dengan program Sekolah Damai, dan secara tidak langsung dengan inisiatif organisasi Wahid Foundation. Jadi, berbicara proses kemunculan praktik pengelolaan keragaman di ketiga sekolah itu, dapat dilihat bahwa hal tersebut bermula dari implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation.

Berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah swasta di Semarang, dalam hal ini yaitu di SMK Kanisius Ungaran, dapat ditelusuri proses kelahirannya dengan melihat keterlibatan seorang tokoh agama Katolik Semarang. Kegiatan ekskul rebana di sekolah tersebut lahir atas masukan dari seorang pemuka agama Katolik yang bernama Romo Aloysius Budi Purnomo, yang biasa disebut Romo Budi, dengan alasan memfasilitasi ekspresi keagamaan siswa beragama Islam. Gagasan itu muncul setelah Romo Budi, dalam suatu kesempatan kunjungan ke sekolah itu, melihat adanya beberapa siswi SMK Kanisius Ungaran yang mengenakan jilbab.

Adapun berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di Medan ada yang dapat ditelusuri proses kelahirannya, ada pula yang tidak. Praktik-praktik pengelolaan keragaman agama

di sekolah negeri termasuk yang tidak dapat diungkap proses kelahirannya karena pada dasarnya yang mereka lakukan hanya menjalankan apa yang menjadi tugas mereka; dan biasanya ada kecenderungan tradisi-tradisi yang ada di sekolah diteruskan begitu saja oleh para kepala sekolah dan guru yang datang silih berganti.

Sementara praktik-praktik yang ada di sekolah-sekolah swasta, khususnya sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, dapat ditelusuri proses kelahirannya sesuai dengan kelahiran yayasan pendidikan yang menaungi mereka. YPSIM mulai didirikan pada tahun 1987 oleh seorang bernama Sofyan Tan, seorang dokter yang pada waktu itu bekerja sebagai guru dan dosen. Visi pendirian YPSIM memang lembaga pendidikan yang multikultur; bukan hanya dalam aspek agama, tetapi juga dalam hal etnis dan sosial-ekonomi.

Tabel 2 Faktor-faktor Pendorong Praktik Pengelolaan Keragaman

Faktor	Keterangan	Contoh Kasus
Intervensi kepala daerah	Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta pada waktu itu	Sekolah negeri dan swasta di Purwakarta
Intervensi organisasi nonpemerintah	Interfidei di Yogyakarta, Wahid Foundation di Semarang	Sekolah negeri dan swasta di Yogyakarta, sekolah dampingan Wahid Foundation di Semarang
Intervensi tokoh agama	Romo Aloysius Budi Purnomo	SMK Kanisius Ungaran, Kabupaten Semarang
Visi lembaga	YPSIM, Yayasan Al-Muhajirin, Yayasan PIRI, Sekolah Olifant, SMA Tumbuh, SMA BOPKRI 1	Sekolah yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga tersebut
Inisiatif guru	Guru PAI di SMAN 1 Yogyakarta	SMAN 1 Yogyakarta

Sumber: hasil olah data.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa proses kelahiran praktik-praktik pengelolaan keragaman agama dapat dikaitkan dengan lima faktor pendorong. Kelima faktor pendorong tersebut yaitu in-

tervensi dari kepala daerah, intervensi dari organisasi nonpemerintah, intervensi tokoh agama, visi lembaga, dan inisiatif guru. Tabel 2 menguraikan kelima faktor di atas.

Model Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah

Berbagai uraian di atas telah mengungkapkan praktik-praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di lima daerah yang menjadi lokasi penelitian. Jika ditelaah, spektrum praktik-praktik itu cukup luas, dari yang sifatnya mendasar dengan mengandalkan mata pelajaran PPKn dan program pendidikan karakter, hingga yang inovatif seperti modifikasi mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan antar agama (interreligious education). Jika dikategorikan berdasarkan aspek-aspek yang muncul, maka tampak bahwa ragam praktik itu berkisar dalam aspek kurikulum, ekstrakurikuler, kokurikuler, sarana dan prasarana, pengelolaan kelas, rekrutmen GTK, acara selebrasi, dan sksi sosial. Sementara itu, dengan memperhatikan proses kelahiran ragam praktik yang ada, dapat dilihat bahwa pengelolaan keragaman agama di sekolah terkait dengan keberadaan intervensi kepala daerah, intervensi organisasi nonpemerintah, intervensi tokoh agama, visi lembaga, dan inisiatif guru. Adapun perihal daya tahan dan pelembagaan, tampaknya belum ada sekolah yang mengamati serta mengupayakannya dengan baik.

Dengan melihat ragam dan proses kelahirannya, variasi praktik-praktik tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut berdasarkan keberadaan visi lembaga terkait keragaman, intervensi dari eksternal, dan inisiatif internal. Visi lembaga, yayasan pendidikan atau sekolah, yang berkaitan dengan keragaman berperan penting dalam melahirkan praktik-praktik pengelolaan keragaman. Sekolah-sekolah yang diceritakan di atas, ada yang memiliki visi, baik eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan toleransi dan pengelolaan keragaman; ada pula yang tidak. Peran visi tentang keragaman ini lebih banyak berlaku untuk sekolah-sekolah swasta; karena untuk sekolah-sekolah negeri, visi yang dimiliki tidak berpengaruh langsung terhadap kebijakan dan kebiasaan yang ada di sekolah-sekolah yang bersangkutan. Adapun intervensi dari eksternal atau pihak luar maksudnya yaitu keberadaan peran pihak luar sekolah dalam menginisiasi berbagai praktik pengelolaan keragaman di suatu sekolah. Uraian di atas telah menunjukkan bahwa ada beberapa pihak yang berperan dalam kehadiran praktik-praktik pengelolaan keragaman di sekolah. Pihak-pihak tersebut yaitu: kepala daerah, organisasi nonpemerintah, tokoh agama, dan guru. Hal tersebut berlaku baik di sekolah-

sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta. Tabel 3 menunjukkan pemetaan dan labelisasi praktik-praktik pengelolaan keragaman yang ditemukan dalam penelitian ini.

Tabel 3 Model Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah

Kategori	Visi	Intervensi Eksternal	Inisiatif Internal
Normatif	-	-	-
Mandiri	-	-	Ya
Maju	-	Ya	-
Inovatif	Ya	Ya/Tidak	-

Sumber: hasil olah data.

Tabel 3 memaparkan pemetaan dan labelisasi ragam praktik pengelolaan keragaman yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu. Tampak bahwa sekolah-sekolah yang diteliti ada yang memiliki visi yang terkait dengan keragaman, ada yang tidak. Sekolah-sekolah dimaksud juga ada yang mendapatkan intervensi dari pihak luar, ada yang tidak. Praktik-praktik di sekolah-sekolah yang bervisi keragaman, baik itu yang mendapatkan intervensi dari pihak luar ataupun tidak, dikategorikan sebagai “Praktik Inovatif”. Sekolah-sekolah dengan kategori ini sudah berani berinovasi dalam kurikulum, misalnya dengan menghadirkan pendidikan antaragama atau memodifikasi mata pelajaran tertentu dalam rangka mendukung pengelolaan keragaman. Hal tersebut biasanya ada di sekolah-sekolah swasta. Adapun praktik-praktik di sekolah-sekolah yang tidak bervisi keragaman tetapi mendapatkan intervensi dari pihak luar dikategorikan sebagai “Praktik Maju”. Sekolah-sekolah dengan kategori ini bisa “berinovasi” hanya setelah mendapatkan treatment tertentu dari pihak luar, misalnya pemerintah daerah atau tokoh tertentu. Ini biasa terjadi pada sekolah negeri dan sekolah swasta yang tidak memiliki visi terkait keragaman. Sementara itu, praktik-praktik di sekolah-sekolah yang tidak bervisi keragaman serta tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar dikategorikan sebagai “Praktik Normatif”. Biasanya, sekolah-sekolah dengan kategori ini hanya mengandalkan kurikulum yang ada dalam mengelola keragaman, misalnya materi-materi dalam mata pelajaran PPKn dan program

PPK. Hal tersebut bisa terjadi di baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri.

Terlepas dari ada atau tidaknya intervensi dan visi, dalam kasus salah satu sekolah negeri di Yogyakarta, ada peran seorang guru agama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Sang guru agama atas inisiatif pribadi melakukan berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman di sekolah tempat ia mengajar. Hal itu dilandasi pemahamannya tentang agama, yang seharusnya moderat dan menghargai perbedaan. Dalam hal ini, dengan merujuk Tabel 3, praktik demikian itu dikategorikan sebagai “Praktik Mandiri”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa pihak yang berkontribusi terhadap lahirnya praktik-praktik pengelolaan keragaman di sekolah-sekolah yang diteliti. Pihak-pihak tersebut yaitu kepala daerah, organisasi nonpemerintah, tokoh agama, yayasan pendidikan, dan peran guru pendidikan agama (Islam).

Untuk kasus sekolah-sekolah di Purwakarta, terutama untuk sekolah-sekolah negeri, peran kepala daerah, yang waktu itu adalah Bupati Dedi Mulyadi, sangat vital dalam menggagas dan mengimplementasikan pendidikan karakter yang mengarah pada toleransi dan penghormatan terhadap keragaman. Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, yaitu periode 2008-2013 dan 2013-2018. Ia memang dikenal sebagai pribadi yang pandangan agamanya moderat, mengusung toleransi dan penghormatan terhadap keragaman. Sehubungan dengan itu, ia biasa dikaitkan dengan kegiatan yang mempromosikan toleransi (Kompas.com 2017; Salam 2018; Rahayu 2017). Dalam masa pemerintahannya, Dedi Mulyadi mengeluarkan Perbup No. 69/2015 tentang Pendidikan Berkarakter; yang kemudian berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman di sekolah-sekolah yang ada di Purwakarta.

Dalam kasus Yogyakarta dan Semarang, ditemukan bahwa ada peran organisasi nonpemerintah dalam menginisiasi dan menanamkan gagasan tentang keragaman di antara para guru agama. Organisasi tersebut yaitu Wahid Foundation, melalui program “Sekolah Damai”. Wahid Foundation merupakan sebuah organisasi yang ditujukan untuk mewujudkan visi KH Abdurrahman Wahid, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia, yang berkaitan dengan toleransi dan pengelolaan keragaman. Orientasinya tidak hanya terkait dengan ke-Islaman atau keagamaan, tetapi juga meliputi demokrasi, kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian (Wahid Foundation 2015).

Sementara itu, di sekolah-sekolah di Yogyakarta, dapat dilihat adanya pengaruh dari organisasi Interfidei. Interfidei, singkatan dari Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia, merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh para tokoh yang peduli dengan kehidupan sosial dan keagamaan Indonesia. Tujuan organisasi tersebut yaitu mempromosikan pentingnya merawat dan menghidupkan keragaman serta kerja sama dalam mencari solusi untuk berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia. Lembaga tersebut dikenal juga dengan nama Institut DIAN, singkatan dari Dialog Antariman di Indonesia (Interfidei n.d.). Organisasi tersebutlah yang telah memberikan berbagai pelatihan kepada beberapa guru pendidikan agama mengenai pluralisme. Alumni-alumni pelatihan Interfidei kemudian menerapkan ilmunya di sekolah masing-masing sehingga lahir praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam kasus SMK Kanisius Ungaran, ada peran tokoh agama—yaitu Romo Budi—dalam menginisiasi hadirnya praktik-praktik pengelolaan keragaman di sekolah tersebut. Romo Budi memiliki nama lengkap Romo Aloysius Budi Purnomo, yaitu seorang pastor yang menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Kesukupan Agung Semarang (Sugiyanto 2019) dan Romo Kepala Riksa Pastoral Kampus Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang (Nurdin 2017). Romo Budi dikenal sebagai tokoh agama Katolik yang dekat dengan tokoh-tokoh agama Islam dan giat mempromosikan dialog antaragama dalam kerangka menjaga persatuan bangsa (Sugiyanto 2019). Oleh karena itu, ia dikenal sebagai tokoh agama yang memiliki visi tentang toleransi dan penghormatan terhadap keragaman.

Adapun dalam kasus sekolah swasta secara umum, yang menjadi determinan dari adanya praktik pengelolaan keragaman agama adalah visi yayasan yang menaunginya. Sekolah-sekolah seperti SMA Tumbuh, SMA Budi Mulia Dua, Sekolah Olifant di Yogyakarta merupakan contoh sekolah-sekolah yang bervisi keragaman. Selain itu, ada juga sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda di Medan.

Visi SMA Tumbuh yaitu “anak tumbuh dan berkembang sebagai pembelajar yang berkarakter, menghargai keberagaman dan kearifan lokal, mencintai tanah air dan menunjukkan kesadaran sebagai warga dunia.” Sementara misinya yaitu: menyelenggarakan pendidikan inklusif yang mengembangkan anak sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing; memberikan pembelajaran yang mendorong anak menghargai keragaman agama, ekonomi, sosial, budaya, dan kebutuhan khusus; memberikan pembelajaran yang mendorong anak menghargai kekayaan bangsa

dan potensi lokal, cinta tanah air dan kearifan lokal; dan memberikan pembelajaran yang menyiapkan anak sebagai warga dunia, berpikiran terbuka dan aktif berkontribusi secara positif (Sekolah Tumbuh 2018).

Sementara itu, visi SMA Budi Mulia Dua yaitu “mewujudkan civitas sekolah yang berlogika kritis, berintelegensia sosial, memiliki nilai-nilai universal Islam dan berkesadaran sebagai warga dunia.” Misi sekolah tersebut yaitu: mengembangkan proses pembelajaran yang menyeimbangkan kemampuan logika dan intelegensia sosial serta menanamkan nilai-nilai universal Islam sebagai bagian untuk membentuk civitas sekolah yang berkesadaran sebagai warga dunia (SMA Budi Mulia Dua 2017).

Adapun visi Sekolah Olifant yaitu “menjadi pelopor, dan penyedia pendidikan Indonesia modern untuk para pelajar muda, dan untuk membantu mempersiapkan mereka dalam rangka mencapai tujuan dalam komunitas yang semakin mengglobal dan internasional.” Sementara misinya yaitu: untuk mengasuh anak-anak secara holistik, baik di tingkat global maupun lokal, dengan tujuan membesarkan generasi yang kompeten, percaya diri, toleran, tegas, kreatif, komunikatif, menghargai orang lain, dan memiliki perspektif dunia yang terbuka dan jelas; serta untuk memelihara karakter individu anak-anak dengan memberikan pengetahuan terkini dan komprehensif (Olifant School n.d.).

Visi tentang yang bernuansa keragaman juga tampak dalam visi Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda; yang berbunyi “mendidik generasi muda Indonesia menjadi manusia yang cerdas, religius, humanis dalam bingkai kesetaraan dan keberagaman.” Adapun misinya yaitu: menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat play group, TK, SD, SMP, SMA/SMK berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku dengan muatan khusus berbasis budaya, karakter, dan kewirausahaan; menyelenggarakan program anak asuh silang dan berantai, untuk memberdayakan generasi muda dari beragam suku yang secara ekonomi berkekurangan agar bisa melakukan mobilitas sosial; menyelenggarakan pendidikan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mempererat kerjasama, membangun kebersamaan, serta mengikis cara berpikir yang penuh muatan prasangka kesukuan dan kebencian rasial; serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama sesuai kepercayaan yang dianutnya (Saliman, Wulandari, and Mukminan 2013).

Lain halnya dengan cerita SMAN 1 Yogyakarta, di mana salah seorang gurunya berinisiatif untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat di kalangan siswanya. Sang guru merupakan seorang lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam dari Universitas Is-

lam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sema-sa menempuh pendidikan di UIN itu, ia juga memperdalam ilmu agamanya di pesantren Krapyak, Yogyakarta. Di samping melakukan pendekatan personal terhadap para siswa, ia juga berusaha untuk membangun kesepahaman dengan guru-guru lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman keagamaan sang guru, yang menjadi dasar baginya untuk melakukan penilaian bahwa beberapa siswanya terindikasi memiliki pemahaman keagamaan yang tidak ramah terhadap perbedaan.

Pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah di Indonesia mencerminkan implementasi pendidikan multikultural. Dalam konteks tersebut, para peserta didik diajak untuk belajar hidup berdampingan dalam perbedaan yang sederajat. Sebagaimana dianjurkan oleh Arifudin (2007), pendidikan multikultural dalam penelitian ini dilakukan tanpa membuat mata pelajaran khusus, tetapi dengan mengintegrasikannya dengan berbagai mata pelajaran serta kegiatan lain yang ada di sekolah.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah membentang dari yang bersifat normatif hingga yang inovatif. Dengan melihat proses kelahirannya, dapat dilihat bahwa ada beberapa pihak yang berperan dalam kehadiran praktik-praktik tersebut. Pihak-pihak tersebut yaitu: kepala daerah, organisasi nonpemerintah, yayasan pendidikan, tokoh agama, dan guru pendidikan agama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik-praktik pengelolaan keragaman agama memang sebetulnya sudah ada di sekolah-sekolah. Lebih jauh lagi, inisiatif-inisiatif yang terkait dengan pengelolaan keragaman agama juga telah banyak dilakukan, baik oleh individu maupun lembaga. Namun, berbagai praktik dan inisiatif itu berserak sedemikian rupa sehingga tidak dirasakan pengaruhnya dalam konteks yang lebih luas. Karena bergerak sendiri-sendiri, inisiatif-inisiatif itu harus menghadapi berbagai permasalahan masing-masing, tanpa adanya kerja sama. Padahal, tujuan dan tantangan yang mereka hadapi tidak jauh berbeda.

Beberapa sekolah memang tidak memiliki praktik pengelolaan keragaman yang sistematis dan terorganisasi dengan baik. Hal tersebut diduga terkait dengan kedudukan isu pengelolaan keragaman agama dalam dunia pendidikan di Indonesia secara umum. Isu pengelolaan keragaman agama sepertinya masih tertutupi agenda-agenda lain yang dianggap lebih mendesak, terutama pencapaian akademik. Di samping itu, dalam benak pihak sekolah dan dinas pendidikan pada um-

umnya tertanam pandangan bahwa para siswa sudah terbiasa hidup berdampingan secara rukun sehingga tidak ada masalah yang terkait dengan keragaman agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Choirul. 2018. "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4 (2): 1–18. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074>.
- Apriliani, Ismi, and Hatim Ghazali. 2016. "Toleransi Remaja Islam Kepada Pemeluk Agama Yang Berbeda: Studi Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) SMA Di Bekasi, Jawa Barat." *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 1 (1): 1–22. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v1i1.32>.
- Arifin, Akhmad Hidayatullah Al. 2012. "Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia." *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 1(1): 72–82. <https://doi.org/10.32332/elementary.v3i1.785>.
- Arifudin, Iis. 2007. "Urgensi Implementasi Pendidikan Multikultural Di Sekolah." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 12 (2): 220–33. <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.252>.
- Baharun, Hasan, and Robiatul Awwaliyah. 2017. "Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 5 (2): 225–43. <https://doi.org/10.15642/jpai.2017.5.2.224-243>.
- Hanafi, Imam, Imran Rosidi, Zulkifli M. Nuh, Alimuddin Hassan, and Maulana. 2019. "Studi Kompetensi Multikulturalisme Pada Dosen UIN Jakarta Dan UIN Riau." *Kontekstualita* 34 (1): 1–18. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v34i1.79>.
- Handayani, Puji. 2016. "Kebijakan Sekolah Untuk Mengantisipasi Diskriminasi Minoritas Di SMAN1 Muntilan." In *Mengelola Keragaman Di Sekolah: Gagasan Dan Pengalaman Guru*, edited by Suhadi, Linah Khairiyah Pary, Fardan Mahmudatul Imamah, and Marthen Tahun, 99–108. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Universitas Gadjah Mada. <https://doi.org/10.1177/0034523717745341>.
- Interfidei. n.d. "Interfidei." Accessed January 22, 2020. <https://www.interfidei.or.id/profil>.
- Karolina, Anita Ida, Sulistyarini, and Rustiyarso. 2019. "Peran Sekolah Dalam Membangun Sikap Toleransi Beragama." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 8 (3): 1–9.
- Kementerian Agama. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kompas.com. 2017. "Dedi Mulyadi: Toleran Dan Intoleran Jangan Dibawa Ke Ranah Politik." 2017. <https://regional.kompas.com/read/2017/05/22/16523451/dedi.mulyadi.toleran.dan.intoleran.jangan.dibawa.ke.ranah.politik>.
- Maarif Institute. 2018. *Menjaga Benteng Kebinekaan Di Sekolah (Studi Kebijakan OSIS Di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Dan Kota Tomohon)*. Jakarta: Maarif Institute.
- Nurdin, Nazar. 2017. "Cara Unik Romo Budi Saat Pindah Tempat Pelayanan." 2017. <https://regional.kompas.com/read/2017/11/30/11145141/cara-unik-romo-budi-saat-pindah-tempat-pelayanan>.
- Olifant School. n.d. "Vision, Olifant School." Accessed January 22, 2020. <https://www.olifantschool.com/vision>.
- PPIM UIN Jakarta. 2018. "Pelita Yang Meredup: Potret Keberagamaan Guru Indonesia." Jakarta.
- Rahayu, Cici Marlina. 2017. "Dedi Mulyadi Dan Ridwan Kamil Bicara Toleransi Di Kongres Komnas HAM." 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3448924/dedi-mulyadi-dan-ridwan-kamil-bicara-toleransi-di-kongres-komnas-ham>.
- Raihani. 2014. "Creating a Culture of Religious Tolerance in an Indonesian School." *South East Asia Research* 22 (4): 541–60. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0234>.
- Republika. 2019. "Ini Desa Terbaik Dalam Toleransi Beragama Di Karanganyar." Republika.Co.Id. 2019. <https://republika.co.id/berita/pxuwge368/nasional/daerah/19/09/14/pxtxrf3720000-ini-desaterbaik-dalam-toleransi-beragama-di-karanganyar>.
- Republika Online. 2019. "Kemenag: Indeks Kerukunan Indonesia Kategori Tinggi." Republika Online. December 16, 2019. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/12/18/dunia-islam/islam-nusantara/19/12/16/q2lofx428-kemenag-indeks-kerukunan-indonesia-kategori-tinggi>.
- Salam, Bram. 2018. "Dedi Mulyadi Aplikasikan Nilai Toleransi Hasil Ajaran Gus Dur." 2018. <https://www.merdeka.com/politik/dedi-mulyadi-aplikasikan-nilai-toleransi-hasil-ajaran-gus-dur.html>.

- Saliman, Taat Wulandari, and Mukminan. 2013. "Laporan Kemajuan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi "model Pendidikan Multikultural Pada 'sekolah Pembauran' Di Medan, Sumatera Utara." Yogyakarta.
- Sekolah Tumbuh. 2018. "About Sekolah Tumbuh." 2018. <https://sekolahtumbuh.sch.id/about-sekolah-tumbuh/>.
- Setara Institute. 2018. "Press Release Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018." <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/>.
- SMA Budi Mulia Dua. 2017. "About SMA Internasional Budi Mulia Dua." 2017. <http://sma.budimuliadua.com/about-us/>.
- Sugiyanto, Antonius E. 2019. "Pastor Aloysius Budi Purnomo: Dialog Dan Gereja Yang Terus Belajar." 2019. <https://www.hidupkatolik.com/2019/07/30/38272/pastor-alloysius-budi-purnomo-dialog-dan-gereja-yang-terus-belajar/>.
- Sumai, Sumarni, Adinda Tessa Naumi, and Hariya Toni. 2017. "Dramaturgi Uat Beragama: Toleransi Dan Reproduksi Identitas Beragama Di Rejang Lebong." *Kontekstualita* 33 (1): 118–43. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita/article/view/33/13>.
- Suparlan, Parsudi. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural." *Antropologi Indonesia* 69: 16–19.
- Syaifuddin, Achmad Fedyani. 2006. "Membumikan Multikulturalisme Di Indonesia." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI* 2 (1): 3–10.
- Tribunnews.com. 2018. "Desa Toleransi Yang Menggetarkan Hati Di Jawa Timur: Tidak Ada Sekat Antar Umat Lain Agama." 2018. <https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/04/desa-toleransi-yang-menggetarkan-hati-di-jawa-timur-tidak-ada-sekat-antar-umat-lain-agama?page=2>.
- Wahid Foundation. 2015. "Tentang Wahid Foundation." 2015. <http://wahidfoundation.org/index.php/page/index/About-Us>.
- . 2018. "Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Di Indonesia 2017: Mengikis Politik Kebencian." <http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Laporan-Tahunan-Kemerdekaan-BeragamaBerkeyakinan-KBB-di-Indonesia-2017>.
- Warsah, Idi. 2017. "Relevansi Relasi Sosial Terhadap Motivasi Beragama Dalam Mempertahankan Identitas Keislaman Di Tengah Masyarakat Multi Agama (Studi Fenomenologi Di Desa Suro Bali Kepahiang Bengkulu)." *Kontekstualita* 34 (2): 149–77. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita/article/view/42/21>.
- Yaqin, M. Ainul. 2019. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan*. Yogyakarta: LKiS.
- Yayasan Cahaya Guru. 2019. *Cahaya Bineka Taman Bangsa: Narasi Dan Panduan Kegiatan Pengembangan Nilai Pancasila (Buku 2)*. Jakarta: Yayasan Cahaya Guru.